



KPU

KABUPATEN SUMBAWA

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS KPU KABUPATEN

SUMBAWA TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Salim

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syamsi Hidayat

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 13 Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa

★ Syamsi Hidayat

Pihak Pertama

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa

Agus Salim

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100%
2.	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	100%
3.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	100%
4.	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	5 Lembaga
5.	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	100%
8.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	100%
9.	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	100%
10.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 Laporan
11.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%
12.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	100%
14.	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	5 Lembaga
15.	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman KPU.	80%
16.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	100%
17.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	4 Laporan
18.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
19.	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase jumlah Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku.	100%
20.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100%
21.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	100%
22.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%
23.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	100%
24.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota.	95%
25.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	100%
26.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
27.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	100%
28.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material.	100% (WTP)
29.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota.	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota.	100
30.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP.	100%
31.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	2 Laporan
32.	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase KPU penyediaan data dan informasi secara valid.	100%
33.	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku.	100%
34.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai.	memadai.	
35.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia.	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada.	100%
36.	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	100%
37.	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait.	Persentase pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait.	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.988.514.000,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 42.093.000,-
JUMLAH		Rp. 3.030.607.000,-

Sumbawa Besar, 13 Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa



Syamsi Hidayat

Pihak Pertama

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa



Agus Salim